

**EVALUASI DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN**

*Impact Evaluation of Government Assistance on the Improvement of
Quality of Vocational Education*

Aziz Wahyu Suprayitno¹

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Anggaran,
Jakarta,
aziz.wahyu@kemenkeu.go.id

Riwayat Artikel:
Diterima 30-12-2020
Direvisi 07-06-2021
Disetujui 11-06-2021
Tersedia online 14-06-2021

JEL Classification: C33, H52

Abstract

This study aims to evaluate the impact of Government Assistance on the improvement of the Quality of Vocational Education. This study used the Difference in Difference (DID) method to estimate the effects of Government Assistance allocation by comparing the changes in outcome {quality of Vocational Education measured by School Quality Report (Rapor Mutu Sekolah) with a scale of 1 – 7} between the Vocational High School that received Government Assistance (intervention/treatment group) and the Vocational High School that did not receive the assistance (control group), used regression model by testing the parallel trend assumption first. Secondary data consists of Government Assistance and Vocational High School Quality Report for 2013 – 2018 from the Directorate of

Vocational Education, Ministry of Education and Culture. Government Assistance data selected were only Assistance for facilities/infrastructure and Assistance for rehabilitation/construction of buildings by using a purposive sampling technique. The results showed that the average value of the Vocational High Schools that received Government Assistance was higher by 0.0373 compared to Vocational High Schools that did not receive Government Assistance, after the intervention of Government Assistance from 2016 - 2018. That results indicate that Government Assistance has a positive impact on improving the Quality of Vocational Education.

Keywords : *impact evaluation, DID, quality of vocational education, government assistance..*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemberian Bantuan Pemerintah terhadap peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini menggunakan metode *Difference in Difference* (DID) untuk mengestimasi dampak dari pemberian Bantuan Pemerintah dengan membandingkan perubahan *outcome* (Mutu Pendidikan SMK yang diukur dengan Rapor Mutu Sekolah yang berisi nilai dengan skala 1-7) antara SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah dengan SMK yang tidak mendapat Bantuan Pemerintah. Model yang digunakan adalah regresi dengan pengujian *parallel trend assumption* terlebih dahulu. Data sekunder berupa data Bantuan Pemerintah dan Rapor Mutu SMK Tahun 2013-2018 yang berasal dari Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Data Bantuan Pemerintah yang dipilih hanya bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata Rapor Mutu SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah lebih tinggi sebesar 0,0373 dibandingkan dengan SMK yang tidak mendapat Bantuan Pemerintah, setelah dilakukan intervensi pemberian Bantuan Pemerintah dari Tahun 2016–2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah memberikan dampak positif dalam meningkatkan Mutu Pendidikan SMK.

Kata kunci: evaluasi dampak, DID, mutu pendidikan SMK, bantuan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah wajib menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan membangun sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Teori baru pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan di awal 80-an datang untuk memperbaiki kekurangan dari teori klasik yang menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi, salah satu elemen modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Pelinescu, 2014). Investasi di bidang pendidikan memberikan dampak positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional (Wilson dan Briscoe, 2004).

Pendidikan, terutama di tingkat menengah, memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Direktorat Pembinaan SMK, 2015). Pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadi modal utama yang diperlukan calon tenaga kerja yang akan terjun ke dunia kerja, utamanya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mengedepankan kemajuan teknologi yang mendorong manusia untuk mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi antar sesama (*World Economic Forum Annual Meeting*, 2016). Kemajuan teknologi yang semakin cepat, tentunya mendorong manusia agar dapat beradaptasi lebih cepat, salah satunya melalui peningkatan daya saing dan kualitas tenaga kerja agar dapat menyesuaikan dengan perubahan di dunia industri.

Di sisi lain, terdapat permasalahan yang serius yang ~~menghinggapi~~ dihadapi angkatan kerja di Indonesia, dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan SMK merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 11,24% (BPS, 2018). Oleh karena itu, **salah satu cara** dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan lulusan SMK melalui perbaikan pada mutu pendidikannya. Hal ini tentunya menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk menjembatani kebutuhan antara dunia pendidikan dan industri. Salah satu langkah pemerintah untuk menjembatani kebutuhan tersebut adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. Adanya

program *link and match* dalam inpres tersebut diharapkan dapat mendorong penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan.

Sebagai tindak lanjut dari peningkatan kompetensi SDM tersebut, Direktorat Pembina SMK mencantumkan kebijakan pendidikan pada Rencana Strategis 2015–2019 berupa intervensi yang dilakukan pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong peningkatan Mutu Pendidikan SMK. Dalam Rencana Strategis tersebut ditetapkan bahwa intervensi yang dilakukan antara lain seperti: (1) beasiswa; (2) revitalisasi sarpras; (3) pembelajaran berbasis TIK; (4) pengembangan *teaching industry*; (5) penambahan guru produktif; (6) kemitraan dengan Perguruan Tinggi; (7) kemitraan dengan industri; (8) penambahan RKB/USB; dan (9) peningkatan citra SMK. Selain itu, dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97% pada tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Program yang dimaksud adalah melalui pemberian Bantuan Pemerintah kepada SMK. Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah (PMK 168, 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan bantuan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

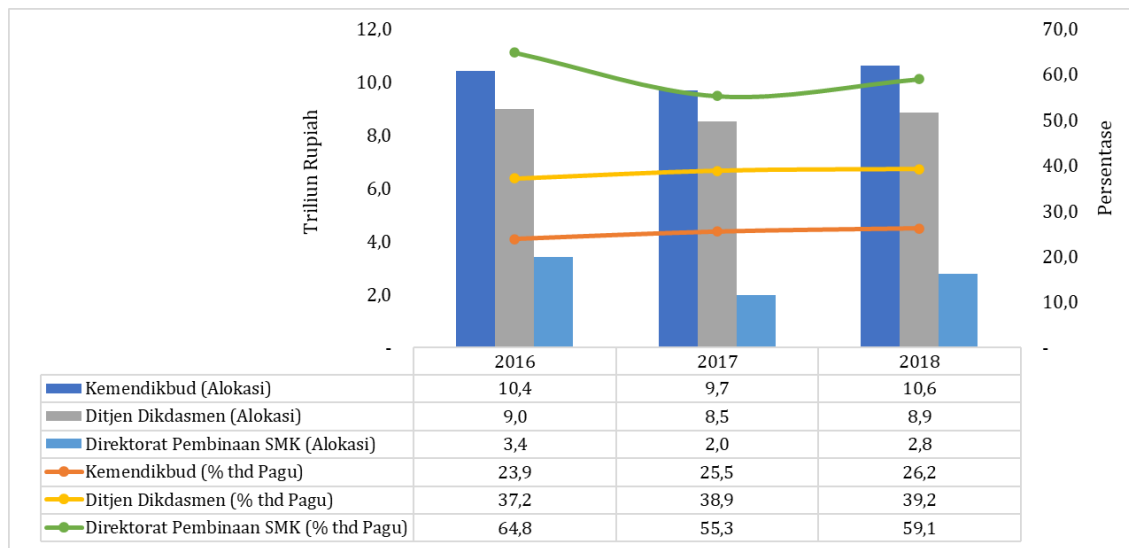
Tabel-1: Alokasi bantuan pemerintah tahun 2016–2018

Unit	2016		2017		2018	
	Pagu Total	Bantuan Pemerintah (Akun 526)	Pagu Total	Bantuan Pemerintah (Akun 526)	Pagu Total	Bantuan Pemerintah (Akun 526)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43,6	10,4	38,0	9,7	40,5	10,6
Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	24,2	9,0	21,9	8,5	22,6	8,9
Direktorat Pembinaan SMK	5,3	3,4	3,6	2,0	4,7	2,8
% Dit. Dikdasmen thd Kemendikbud	55,5	86,5	57,8	88,0	55,7	83,3
% Dit. PSMK thd Dit. Dikdasmen	21,7	37,9	16,3	23,2	20,8	31,3

Sumber: *Business Intelligence-DJA*, diolah (2020)

Dari Tabel-1 di atas diperoleh gambaran bahwa alokasi Bantuan Pemerintah yang disalurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) pada tahun 2016–2018 mendominasi alokasi Bantuan Pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan rata-rata di atas 80,0% (86,5% di tahun 2016, 88,0% di tahun 2017, dan 83,3% di tahun 2018) dari Pagu Total Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat Pagu Ditjen Dikdasmen dibandingkan pagu total Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu di atas 50,0%, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah pada Ditjen Dikdasmen mencerminkan kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan. Berikut disajikan grafik

perbandingan alokasi Bantuan Pemerintah yang ada di Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Sumber: *Business Intelligence* – DJA, diolah

Gambar 1. Grafik perkembangan alokasi belanja bantuan pemerintah tahun 2016–2018

Diagram batang menunjukkan Belanja Bantuan Pemerintah (dalam triliun rupiah) dan diagram garis menunjukkan persentase (porsi) alokasi Bantuan Pemerintah terhadap Total Pagu. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016–2018, alokasi Belanja Bantuan Pemerintah cenderung fluktuatif, namun secara persentase terhadap total pagu cenderung mengalami kenaikan. Persentase Belanja Bantuan Pemerintah di Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2018 adalah sebesar 59,1% dari keseluruhan pagu Direktorat Pembinaan SMK. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase Belanja Bantuan Pemerintah yang disalurkan Ditjen Dikdasmen yaitu sebesar 39,2% dari keseluruhan pagu Ditjen Dikdasmen, serta lebih tinggi dibandingkan persentase Belanja Bantuan Pemerintah yang disalurkan Kemendikbud dibandingkan dengan pagu total Kemendikbud yaitu sebesar 26,2%.

Alokasi Bantuan Pemerintah pada Direktorat Pembinaan SMK yang selalu di atas 50% (dari total pagu Direktorat Pembinaan SMK) dari tahun 2016–2018 menunjukkan komitmen Direktorat Pembinaan SMK dalam menguatkan pendidikan kejuruan. Bantuan tersebut diharapkan memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan Mutu Pendidikan SMK. Alokasi Bantuan Pemerintah dalam penelitian ini dibatasi untuk bantuan yang menggunakan Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (Akun 526) dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sesuai Pasal 3 PMK 168/PMK.05/2015 huruf (e) dan (f), serta dibatasi hanya untuk SMK, baik negeri maupun swasta yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberian Bantuan Pemerintah dengan menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wing, Simon, dan Bello-Gomez (2018) yaitu *Difference in Difference* (DID), akan tetapi ada perbedaan dalam hal obyek penelitian. Obyek dari penelitian Wing, Simon, dan Bello-Gomez adalah pengaruh kebijakan atau program yang berkaitan dengan vaksin, keselamatan berkendara, racun, polusi,

obat-obatan legal dan ilegal, dan perilaku kesehatan yang sulit untuk diukur (*public health policy*). Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah Mutu Pendidikan SMK yang diukur dengan nilai Rapor Mutu Sekolah yang memiliki nilai dengan skala 1-7.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan Kejuruan dan Mutu Pendidikan

Pendidikan, termasuk pendidikan vokasi, memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya (Slamet PH, 2011). Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik (Tjalla, 2010). Dalam arti luas, pendidikan dapat diartikan sebagai persiapan untuk kehidupan dewasa atau untuk fase kehidupan dewasa (UNESCO, 2013). Sementara itu, Pengertian Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena sebagian besar kehidupan orang dewasa dihabiskan dalam dunia pekerjaan atau industri, pendidikan kejuruan adalah bagian dari pendidikan yang mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia tersebut. Pendidikan vokasi dipandang sebagai bekal pendidikan sebelum individu atau kelompok memulai kehidupan kerjanya, serta mempersiapkan mereka untuk itu (Billett, 2011).

Pendidikan kejuruan memiliki tujuan yang sangat kompleks dan beragam seperti bentuk pendidikan lainnya. Cara yang paling sederhana dan yang paling berpengaruh dalam memandang pendidikan kejuruan adalah sebagai pelatihan untuk pekerjaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja saat ini (Clark dan Winch, 2007). Lebih rinci, Slamet PH (2011) menjelaskan tujuan pendidikan vokasi yang mencakup empat dimensi utama, yaitu: (1) mengembangkan kualitas dasar manusia yang meliputi kualitas daya pikir, daya *qolbu*, daya fisik; (2) mengembangkan kualitas instrumental/kualitas fungsional, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga; (3) memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia; dan (4) menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia.

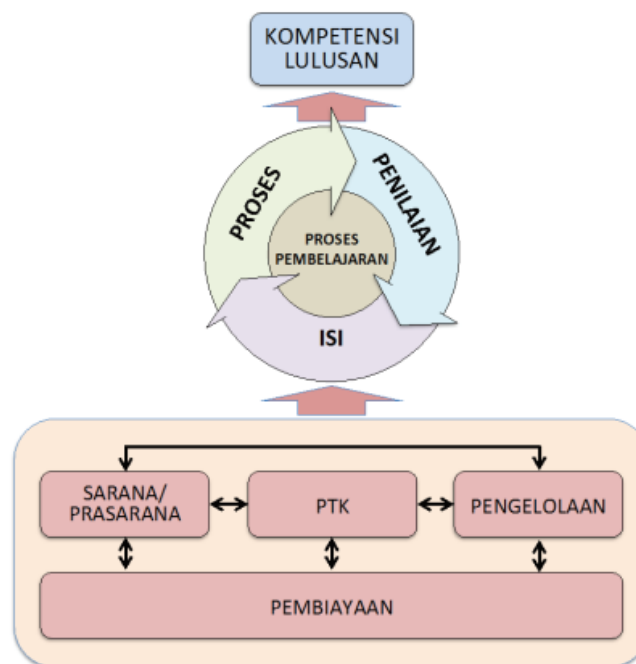
Untuk menjamin tujuan dari pendidikan vokasi tercapai, diperlukan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia (Tjalla, 2010). Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan menjelaskan pengertian mutu pendidikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/manajemen pendidikan dan merupakan suatu usaha yang harus diupayakan agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai (Fadhli, 2017).

Untuk menunjang hal tersebut, Pedoman Umum Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016) menyatakan bahwa Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah didefinisikan sebagai tingkat

kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. Mutu Pendidikan dinilai berdasarkan SNP. SNP merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri dari 8 SNP, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan *output* dalam SNP yang akan mencapai skor yang tinggi bila *input* terpenuhi (pendidik tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan) dan proses (isi, proses, penilaian, pengelolaan) berjalan dengan baik. Kedepalan SNP tersebut membentuk suatu rangkaian *input*–*proses*–*output* yang digambarkan pada bagan di bawah ini.



Sumber: Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (2016)

Gambar 2. Hubungan antarstandar dalam SNP Dasar dan Menengah

Mutu Pendidikan SMK diukur dengan Rapor Mutu Sekolah. Rapor Mutu Sekolah adalah rapor kemajuan sekolah yang berbasis kepada 8 SNP dengan indikator dan sub indikator yang berisi nilai dengan skala 1-7. Semakin tinggi nilainya artinya semakin baik capaian SNP sekolah, demikian juga sebaliknya. Rapor mutu sekolah menggambarkan kondisi sekolah dalam upaya pemenuhan SNP, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun

perencanaan program yang lebih baik dalam upaya memenuhi SNP dimaksud. Tentunya, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan suatu jaminan kualitas (*quality assurance*) untuk menjaga dan meningkatkan standar kualitas sistem pendidikan dan mutu pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Jaminan kualitas memerlukan penetapan kriteria sistemik untuk standar praktik dan tingkat hasil yang diharapkan di sekolah (Cuttance, 1994). Salah satu cara untuk menetapkan kriteria kualitas mutu pendidikan adalah melalui akreditasi. Akreditasi menjadi mekanisme penting dalam pendidikan. Untuk dapat menawarkan program pendidikan di bidang tertentu, institusi harus diakreditasi oleh badan yang berwenang, di mana mereka harus mematuhi kriteria yang ditetapkan (Allais, 2009). Selain itu Allais (2009) juga menjelaskan ide dibalik akreditasi, yang biasanya dikaitkan dengan pendidikan kejuruan, yaitu untuk melindungi publik agar tidak tertipu untuk membayar mata kuliah yang pada akhirnya tidak memungkinkan mereka untuk bekerja di dalam area yang dipilih.

Penjaminan mutu pendidikan menurut Pasal 1 angka 2 Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan akan terlaksana dengan baik dengan adanya suatu sistem terintegrasi yang menjamin mutu pendidikan tersebut. Sistem tersebut merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Penjaminan tersebut dilakukan secara sistemik, menyeluruh, dan berkelanjutan, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

2.2. Bantuan Pemerintah

Usher (2006) mendefinisikan Hibah/Bantuan (*Grants*) dalam beberapa bentuk berdasarkan ruang lingkungannya. Diantaranya adalah (1) Dalam arti paling luas, hibah didefinisikan untuk mencakup semua bentuk bantuan yang tidak dibayar kembali yang dirancang untuk menurunkan biaya pendidikan bagi seorang siswa, termasuk hibah kepada institusi di berbagai negara untuk mengurangi atau menghapuskan segala biaya yang dikenakan kepada siswa; (2) Dalam arti lebih sempit, hibah hanya mencakup bantuan yang tidak dibayar kembali yang dibayarkan kepada siswa (atau keluarganya); dan (3) Dalam arti paling sempit dan tradisional, hibah merupakan pembayaran yang dilakukan kepada siswa perseorangan (tidak termasuk keluarganya) di awal masa sekolah. Di Amerika, besaran dan struktur hibah pemerintah (*government grants*) untuk sekolah sangat bervariasi antarnegara bagian, diantaranya (1) Beberapa hibah ditargetkan untuk wilayah kategorikal yang sempit, sedangkan lainnya adalah untuk mendukung fungsi pendidikan secara umum; (2) Beberapa dialokasikan ke sekolah secara sekaligus, per siswa, sementara yang lain bergantung pada pajak daerah atau keputusan pengeluaran (*spending decision*); dan (3) Beberapa

memperlakukan semua sekolah kabupaten secara merata, sementara yang lain dimaksudkan secara eksplisit untuk mendistribusikan kembali sumber daya (Fisher dan Papke, 2000).

Di Indonesia, Pemerintah telah mendefinisikan Bantuan Pemerintah melalui Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Di sini dijelaskan bahwa Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Ruang lingkup Bantuan Pemerintah mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada K/L yang bersumber dari APBN (Pasal 2, PMK 168/PMK.05/2015). Sementara itu, anggaran Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 3 PMK 168/PMK.05/2015 meliputi, antara lain (a) pemberian penghargaan; (b) beasiswa; (c) tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; (d) bantuan operasional; (e) bantuan sarana/prasarana; (f) bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan (g) bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Pengalokasian belanja Bantuan Pemerintah adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 168/PMK.05/2015 (diolah)

Gambar 3. Pengalokasian belanja bantuan pemerintah

Pengalokasian belanja Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (Akun 526).

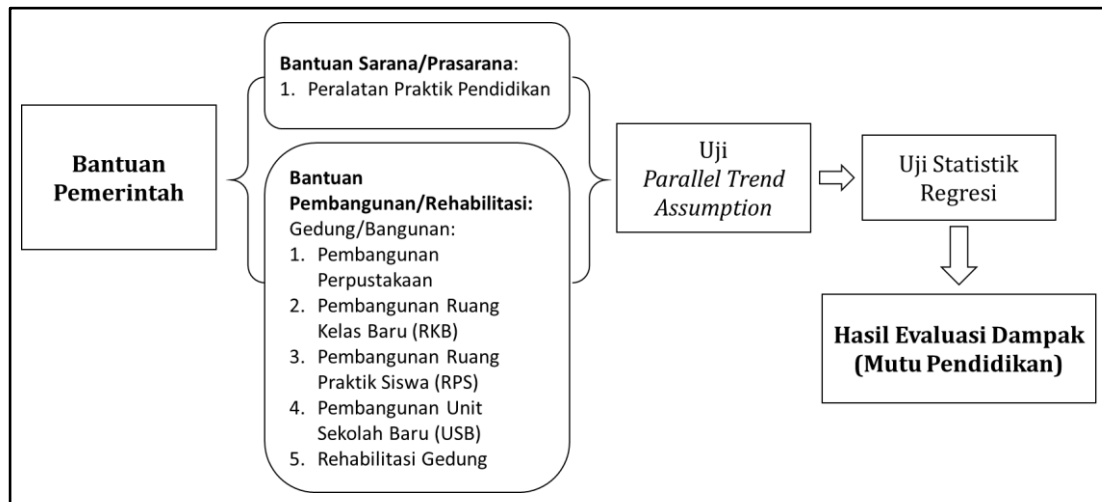
2.3. Evaluasi Dampak

Khandker, Koolwal, dan Samad (2010) menyatakan bahwa evaluasi dampak dibutuhkan untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memutuskan apakah dampak program sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan untuk meningkatkan akuntabilitas alokasi sumber daya di seluruh program pemerintah. Evaluasi dampak juga dibutuhkan untuk memahami perbedaan program yang berhasil dan yang tidak berhasil dan bagaimana ukuran perubahan kesejahteraan yang disebabkan oleh sebuah proyek atau sebuah intervensi kebijakan. Evaluasi dampak sering bergantung pada pengetahuan tentang bagaimana suatu program dirancang, bagaimana program mencapai target, dan bagaimana pelaksanaan program saat sedang

dilaksanakan. Gertler bersama para ahli (2016) menyatakan bahwa evaluasi dampak adalah salah satu bagian dari evaluasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebab-akibat, yaitu apa dampak (atau efek kausal) dari program pada hasil yang diinginkan. Evaluasi dampak merupakan salah satu pendekatan yang mendukung kebijakan berbasis bukti, termasuk monitoring dan evaluasi.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka analisis yang digunakan untuk melihat dampak yang dihasilkan dari diberikannya Bantuan Pemerintah kepada Mutu Pendidikan SMK dalam hal ini adalah Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: diolah (2020)

Gambar 4. Kerangka analisis dampak bantuan pemerintah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 7.426 SMK yang ada di Indonesia dari tahun 2013 s.d. 2018 dengan membandingkan perubahan Mutu Pendidikan SMK antara kelompok *treatment* (SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah) dan kelompok kontrol (SMK yang tidak mendapat Bantuan Pemerintah), sebelum dan setelah adanya kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah. Periode sebelum adalah tahun 2013–2015 dan periode setelahnya adalah tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sekaran dan Bougie (2013) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan sebuah teknik di mana sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang dimaksud adalah SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data Bantuan Pemerintah, Mutu Pendidikan, dan Data Pokok Pendidikan (jumlah siswa) per SMK yang bersumber dari Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mutu Pendidikan SMK diukur dengan Rapor Mutu Sekolah yang berbasis kepada 8 Standar Nasional Pendidikan dengan indikator dan sub indikator yang berisi nilai dengan skala 1-7. Rapor mutu sekolah menggambarkan kondisi sekolah dalam upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

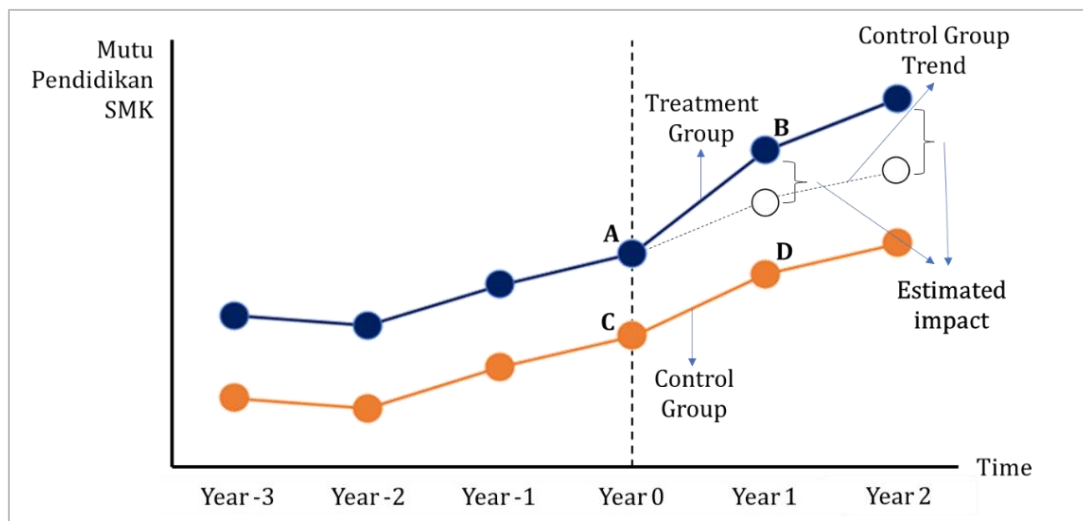
Metode yang paling tepat dalam melakukan evaluasi dampak dari pemberian Bantuan Pemerintah kepada SMK adalah metode *Difference in Difference* (DID). Stuart et al. (2014) menyatakan bahwa metode DID merupakan strategi yang umum digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau program yang dijalankan pada titik waktu tertentu, seperti penerapan peraturan perundang-undangan yang baru. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan evaluasi dampak dengan menggunakan metode DID.

1. Buckley dan Shang (2002) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*Estimating Policy and Program Effects with Observational Data: The DID Estimator*". Ketika uji coba lapangan secara acak tidak memungkinkan atau tidak praktis, peneliti di bidang pendidikan dan ilmu sosial secara lebih luas harus menggunakan data observasi, seperti skor tes terstandarisasi atau tanggapan terhadap pertanyaan survei, untuk mengevaluasi secara kuantitatif pengaruh suatu kebijakan atau program. Potensi kesalahan dari analisis ini adalah bahwa unit observasi tidak secara acak ditugaskan untuk berpartisipasi; sebaliknya, mereka memilih sendiri untuk memperkenalkan kebijakan atau program yang menjadi perhatian. Ini menjadi masalah terhadap pengambilan estimasi dan kesimpulan, jika keputusan untuk menerapkan kebijakan berhubungan dengan penilaian *outcome*. Dalam ilmu ekonometrika, teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data ini sering disebut sebagai "*treatment effects*" models (Goldberger, 1972; Maddala, 1983), di mana kebijakan yang diterapkan merupakan suatu "*treatment*".
2. Athey dan Imbens (2006) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*Identification and Inference in NonLinear DID Models*". Penelitian ini merupakan pengembangan metode DID yang banyak digunakan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan. Model yang diusulkan memungkinkan kelompok yang diintervensi (*treatment group*) dan yang tidak diintervensi (*control group*) mendapatkan manfaat rata-rata yang berbeda dari intervensi.
3. Conley dan Taber (2011) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*Inference with 'Difference in Differences' with a Small Number of Policy Changes*". Penelitian ini menyajikan alternatif pendekatan inferensial untuk jumlah kecil (terbatas) dari pengubah kebijakan, menggunakan informasi dari sampel yang besar dari kelompok yang tidak berubah.
4. Puhani (2011) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*The treatment effect, the cross difference, and the interaction term in nonlinear 'difference-in-differences' models*". Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus model 'DID nonlinear, pengaruh intervensi bukan lah perbedaan silang sederhana, melainkan *difference in cross difference* yaitu selisih antara perbedaan silang dari kondisi yang diharapkan dari hasil yang diamati (mendapat intervensi) dengan perbedaan silang dari kondisi yang diharapkan dari hasil yang potensial tanpa perlakuan.
5. Dimick dan Ryan (2014) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*Methods for Evaluating Changes in Health Care Policy: The DID Approach*". Penelitian observasi secara umum digunakan untuk mengevaluasi perubahan dampak yang berhubungan dengan penerapan kebijakan di bidang kesehatan. Batasan penting dalam menggunakan penelitian observasi dalam konteks ini adalah kebutuhan untuk mengontrol perubahan faktor-faktor di belakangnya yang terjadi bersamaan dengan perubahan waktu.

Pendekatan DID lebih banyak diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Hubungan antara perubahan kebijakan dan dampak yang timbul setelah implementasi dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan kebijakan.

6. Stuart bersama para ahli (2014) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*Using Propensity Scores in DID Models to Estimate the Effects of a Policy Change*". Metode DID membandingkan perubahan dari waktu ke waktu dalam kelompok yang tidak terpengaruh oleh intervensi kebijakan dengan perubahan dari waktu ke waktu dalam kelompok yang terpengaruh oleh intervensi kebijakan, dan mengaitkan DID dengan dampak dari kebijakan tersebut. Metode DID memberikan perkiraan efek yang tidak bias jika tren dari waktu ke waktu akan sama antara kelompok yang mendapat intervensi dan kelompok pembanding tanpa adanya intervensi. Namun, yang harus diperhatikan dari model DD adalah bahwa program dan kelompok intervensi mungkin berbeda dalam cara yang akan mempengaruhi tren mereka dari waktu ke waktu, atau komposisinya dapat berubah seiring waktu. Metode *matching* memungkinkan kita mengurangi bias secara substansial tetapi tidak serta merta menghilangkannya.
7. Wing, Simon dan Bello-Gomez (2014) dalam jurnal ilmiahnya melakukan penelitian yang berjudul "*Designing Diffence in Difference Studies: Best Practices for Public Health Policy Research*". DID desain merupakan desain penelitian *quasi-experimental* yang sering digunakan peneliti untuk mempelajari hubungan sebab-akibat dalam bidang kesehatan masyarakat di mana uji coba terkontrol secara acak (*Randomized Controlled Trials/RCTs*) tidak layak atau tidak etis. Penelitian ini menjelaskan asumsi utama desain DID dan membahas taktik analisis, analisis tambahan, dan pendekatan untuk statistik inferensia yang seringkali penting dalam penelitian terapan. Desain DID bukanlah desain paling sempurna untuk menggantikan eksperimen acak/random, tetapi sering kali merupakan cara yang layak untuk mempelajari hubungan sebab-akibat.

Pada penelitian ini akan dilakukan estimasi dampak pemberian Bantuan Pemerintah dengan membandingkan perubahan yang terjadi pada Mutu Pendidikan SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah dengan *counterfactual*-nya seandainya tidak dilakukan *treatment*/intervensi kebijakan dengan menambahkan variabel lain (*covariate*) berupa Jumlah Siswa. Bantuan Pemerintah kepada SMK diharapkan dapat meningkatkan Mutu Pendidikan SMK melalui perbaikan sarana dan prasarana, serta pembangunan atau rehabilitasi gedung/bangunan. Desain ilustrasi perhitungan dampak pemberian Bantuan Pemerintah dan model analisis dengan menggunakan metode *Difference in Difference* dapat dilihat pada Gambar-5 dan Tabel 2 berikut ini.



Sumber: diolah (2020)

Gambar 5. Ilustrasi dampak bantuan pemerintah terhadap mutu pendidikan SMK

Tabel-2: Model analisis *Difference in Difference*

	<i>Before Intervention</i>	<i>After Intervention</i>	<i>Difference</i>
<i>Treatment Group</i>	A	B	B-A
<i>Comparison/ Control Group</i>	C	D	D-C
<i>Difference</i>	A-C	B-D	DD=(B-A)-(D-C)

Sumber: diolah (2020)

Secara empiris, model estimasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 T_{it} A_{it} + u_i + \lambda_t + \beta_2 \ln \text{Siswa} + \beta_3 \text{Jawa/NonJawa} + \beta_4 \text{Kota/Kab} + \epsilon_{it}$$

- Y = Outcome (Mutu Pendidikan SMK, satuan: Indeks, skala 1 s.d. 10)
- u_i = Efek Individu (*Dummy Variabel Treatment*; SMK yang mendapat bantuan=1, SMK yang tidak mendapat bantuan=0)
- λ_t = Efek Waktu (*Dummy Variabel Waktu*; Setelah 2016=1; Sebelum 2016=0)
- TA = Variabel interaksi, individu yang di-*treatment* ketika intervensi dijalankan
- β_1 = Koefisien Interaksi *Treatment* dan Waktu (Estimasi dampak kebijakan)
- LnSiswa = Variabel Ln Jumlah Siswa per SMK
- Jawa/NonJawa = Variabel *dummy* Jawa=1; Luar Jawa=0
- Kota/Kab = Variabel *dummy* Kota=1; Kabupaten=0

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : Pemberian Bantuan Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Mutu Pendidikan SMK
- H_1 : Pemberian Bantuan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Mutu Pendidikan SMK

Dalam mengestimasi dampak, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah *parallel trend assumption*, di mana asumsi ini merupakan yang paling penting dalam memastikan validitas dari DID model. Asumsi ini mensyaratkan bahwa kelompok *treatment* dan kelompok kontrol

akan mengikuti tren yang sama/konstan sepanjang waktu, seandainya intervensi tidak diberikan (Li, Graham dan Majumdar, 2012; Pischke, 2005). Karakteristik yang tidak teramati yang mempengaruhi partisipasi program/kebijakan tidak berubah seiring waktu bersamaan dengan perubahan status *treatment* (Khandker, Koolwal, dan Samad, 2010). Salah satu cara dalam melakukan pengujian *parallel trend assumption* dengan menggunakan *score matching* (metode pencocokan). Perbedaan level atau tren sebelum dimulainya intervensi antara kelompok *treatment* dan kontrol dapat menghasilkan tren yang berbeda pada perubahan dampak, dan metode pencocokan dapat mengurangi kekhawatiran ini (Ryan, Burgess, dan Dimick, 2015). Strategi lain dalam menguji *parallel trend assumption* dalam penelitian dengan dua atau lebih periode waktu adalah dengan menyesuaikan regresi DID tambahan dengan menggunakan *group-specific linear trends* (Wing, Simon dan Bello-Gomez, 2018). Model regresi yaitu dengan menambahkan variabel dependen yaitu variabel waktu dan interaksi antara variabel *treatment* dan waktu. Jika H_0 (hipotesis nol) ditolak menunjukkan bahwa *parallel trend assumption* tidak valid/tidak terpenuhi. Penelitian ini akan menggunakan metode *group-specific linear trends* dalam menguji *parallel trend assumption*.

Estimasi dalam penelitian ini menggunakan aplikasi STATA 14 dengan menggunakan regresi dengan menambahkan variabel lain seperti Jumlah Siswa, *dummy* Jawa/NonJawa dan *dummy* Kota/Kab. Estimasi dampak kebijakan antara SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah dan SMK yang tidak mendapat Bantuan Pemerintah dilihat dari koefisien hasil regresi. Selain itu, variabel *dummy* Jawa/NonJawa dan *dummy* Kota/Kab dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat atau menggambarkan perbedaan kondisi Mutu Pendidikan SMK yang ada di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, serta perbedaan antara Kota dan Kabupaten, di mana kondisi sarana dan prasarana/infrastruktur di Pulau Jawa dan di wilayah Kota dianggap lebih baik dibandingkan dengan daerah di Luar Pulau Jawa atau Kabupaten.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Berikut disajikan statistik deskriptif dari data digunakan untuk mengetahui gambaran/kondisi umum dari variabel-variabel penelitian.

Tabel-3: Ringkasan statistik variabel penelitian

Variabel	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Mutu Pendidikan	4,5076	1,3664	0,3632	6,1085
TA (Bantuan Pemerintah)*	0,3084	0,4618	0	1
LnSiswa	5,4592	1,0308	0,6931	8,3469
Kota/Kab*	0,2642	0,4409	0	1
Jawa/NonJawa*	0,5927	0,4913	0	1
Jumlah Observasi				22.278

Sumber: hasil pengolahan dengan Aplikasi STATA 14, Ket: (*) merupakan variabel *dummy*

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Mutu Pendidikan (Rapor Mutu SMK) dari jumlah SMK yang diteliti adalah sebesar 4,5076 dari skala 1-7, dengan nilai terendah adalah 0,3632 dan nilai tertinggi adalah 6,1085. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan nilai Mutu Pendidikan yang sangat besar diantara SMK yang ada di Indonesia. Masih terdapat SMK dengan nilai Mutu Pendidikan yang sangat rendah (jauh di

bawah rata-rata) yang dapat diartikan bahwa upaya SMK dalam memenuhi SNP masih belum optimal. Dengan adanya Rapor Mutu SMK diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi sekolah sehingga sekolah dapat merencanakan program peningkatan mutu pendidikan dengan lebih baik.

4.2. Pengujian *Parallel Trend Assumption*

Sebelum melakukan evaluasi dampak, dilakukan pengujian *parallel trend assumption* menggunakan metode *group-specific linear trends* dengan model regresi dengan menambahkan variabel Waktu dan variabel interaksi antara variabel Bantuan Pemerintah dan Waktu (diberi nama variabel BanPer_Waktu). Variabel interaksi didapat dengan cara mengalikan antara variabel Bantuan Pemerintah dan variabel Waktu. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Variabel BanPer_Waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap Mutu Pendidikan SMK

H_1 : Variabel BanPer_Waktu berpengaruh signifikan terhadap Mutu Pendidikan SMK

Beikut hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel-4: Uji *Parallel Trend Assumption*

Variabel Dependen: Mutu	Coefficient	p-value
Variabel Independen:		
Waktu	0,9263	0,000*
BanPer_Waktu	-0,0215	0,262

*Statistically significant at at 1% level

Sumber: hasil pengolahan dengan Aplikasi STATA 14

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *p-value* tidak signifikan, yaitu lebih besar dibanding taraf nyata 5% ($p-value = 0,262 > 0,05$) atau dengan kata lain H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Bantuan_Waktu (variabel interaksi antara Bantuan Pemerintah dan Waktu) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Mutu Pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model memenuhi *parallel trend assumption*, yang artinya metode DID layak digunakan untuk mengestimasi dampak dari pemberian Bantuan Pemerintah terhadap peningkatan Mutu Pendidikan SMK. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hansen, Sabia, dan Rees (2015) yang menggunakan *state-specific linear trends* untuk menangkap faktor-faktor yang hilang pada tingkat negara bagian yang meningkat secara konstan seperti sentimen anti merokok. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan satu dollar pajak rokok menurunkan 0,7% partisipasi merokok, tetapi secara statistik tidak signifikan.

4.3. Evaluasi Dampak Pemberian Bantuan Pemerintah kepada SMK terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan SMK

Setelah melakukan pengujian *parallel trend assumption* dan didapatkan hasil bahwa asumsi tersebut terpenuhi, selanjutnya dilakukan estimasi dampak untuk melihat perubahan/perbedaan Mutu Pendidikan SMK antara SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah dan SMK yang tidak mendapat Bantuan Pemerintah, sebelum dan sesudah dijalankannya kebijakan Pemberian Bantuan Pemerintah kepada SMK dengan menggunakan regresi. Berikut kami sajikan hasil pengolahan data menggunakan STATA 14 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel-5: Estimasi dampak pemberian bantuan pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan SMK

Variabel Dependen: Mutu	Coefficient	p-value
Variabel Independen:		
TA (Bantuan Pemerintah)	0,0373	0,095*
LnSiswa	0,1440	0,000**
Kota/Kab	0,0827	0,000**
Jawa/NonJawa	0,0351	0,059*
Konstanta	3,668	0,000**

*Statistically significant at 10% level; **at 1% level

Sumber: hasil pengolahan dengan Aplikasi STATA 14

Berdasarkan tabel hasil estimasi terlihat bahwa variabel Bantuan Pemerintah memiliki tanda positif dengan nilai koefisien sebesar 0,0373, yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa pemberian Bantuan Pemerintah berpengaruh signifikan atau dengan kata lain berpotensi memberikan dampak (*estimated effect/impact*) dalam peningkatan nilai Mutu Pendidikan sebesar 0,0373, di mana SMK yang mendapat Bantuan Pemerintah memiliki nilai rata-rata Rapor Mutu SMK lebih tinggi sebesar 0,0373 dibandingkan dengan SMK yang tidak mendapat Bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana (Peralatan Praktik Pendidikan) dan bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan (Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru, Ruang Praktik Siswa, dan Unit Sekolah Baru, serta Rehabilitasi Gedung) secara umum memberikan dampak dalam meningkatkan Mutu Pendidikan SMK. Hal ini sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan yang membentuk nilai Mutu Pendidikan, di mana salah satu komponen/jenis dari Standar Nasional Pendidikan adalah Standar Sarana dan Prasarana (Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016). Pemberian Bantuan Pemerintah tersebut akan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana serta gedung/bangunan sekolah yang kemudian akan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan Mutu Pendidikan SMK. Hal tersebut menunjukkan jika peningkatan kualitas dan manajemen sarana dan prasana berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan (Suti, 2011; Megasari, 2014; Yudi, 2012; Tony, 2019; Darmastuti dan Karwanto, 2014). Hasil evaluasi dampak dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (tesis) yang dilakukan oleh Yolanda (2016) di mana dari keempat faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung, antara lain: (1) rasio guru-murid; (2) pengalaman mengajar guru; (3) guru bersertifikasi; dan (4) sarana prasarana. Faktor pengalaman mengajar guru dan sarana prasarana berpengaruh signifikan terhadap Mutu Pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung. Strategi dalam mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran tentunya membutuhkan pengawasan di tingkat yang lebih tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya sehingga Bantuan Pemerintah dapat dimanfaatkan dan digunakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu jika dilihat dari lokasi SMK yang di berada di wilayah Kota dan Kabupaten, SMK yang ada di Kota memiliki nilai rata-rata Rapor Mutu yang lebih tinggi daripada SMK yang ada di Kabupaten dengan selisih sebesar 0,0827. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa faktor geografis (letak sekolah) menjadi faktor penting dan tidak bisa diabaikan, dibuktikan

dengan sekolah yang maju lebih didominasi oleh sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Hal tersebut dan dipahami karena sekolah di pusat kota cenderung lebih mudah mendapatkan akses dalam bidang apapun, sehingga menjadi pertimbangan oleh sebagian besar masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka, serta banyaknya kegiatan, baik yang terkait dengan kependidikan maupun yang lainnya, terjadi di pusat kota (Hidayat, 2014). Perbedaan yang sangat mencolok juga bisa dilihat dari kondisi pendidikan yang meliputi fasilitas, kualitas dan mutu pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat desa dan kota (BPMPK Kemendikbud, 2016). Masyarakat kota lebih mudah mendapatkan akses pendidikan dibandingkan masyarakat desa/kabupaten.

Selanjutnya, dapat dilihat juga bahwa terdapat perbedaan Mutu Pendidikan SMK antara SMK yang ada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nilai rata-rata Rapor Mutu SMK yang ada di Pulau Jawa lebih tinggi 0,0351 jika dibandingkan dengan SMK yang berada di luar Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi. Pendidikan di luar Jawa dan sekolah-sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman jauh tertinggal dalam hal ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyebab lain adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang terlibat di dalam dunia Pendidikan dalam memahami dan mengoperasikan teknologi informasi. Tentunya, ini menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam mendorong siswa dan guru untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu, masalah kurikulum juga menjadi hal mendasar yang menjelaskan adanya kesenjangan dalam mutu pendidikan di Indonesia, dimana Pendidikan di luar Pulau Jawa cenderung stagnan dan jauh tertinggal (Tukan dan Parida, 2016).

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Sarana/Prasarana dan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan kepada SMK memberikan dampak positif terhadap peningkatan Mutu Pendidikan SMK. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana dan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan berpengaruh dalam meningkatkan nilai Rapor Mutu SMK. Standar Sarana dan Prasarana merupakan salah satu dari 8 komponen SNP yang membentuk Mutu Pendidikan selain 7 standar lainnya yang memiliki pengaruh dalam menentukan nilai Mutu Pendidikan. Sementara itu, terkait letak geografi SMK, dapat disimpulkan bahwa Mutu Pendidikan SMK yang ada di Kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan Mutu Pendidikan SMK yang ada di Kabupaten dan Mutu Pendidikan SMK yang berada di Pulau Jawa lebih tinggi jika dibandingkan dengan Mutu Pendidikan SMK di luar Pulau Jawa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta Kota dan Kabupaten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu ketersediaan data, di mana data yang diperoleh sangat terbatas. Dalam hal ini, variabel lain yang digunakan sebagai variabel independen hanya variabel jumlah siswa. Tidak menutup kemungkinan adanya variabel-variabel lain, seperti jumlah guru, tingkat pendidikan guru, jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sekolah (jumlah ruang kelas, laboratorium, komputer, dan sebagainya dalam kondisi baik, rusak ringan/sedang/berat) yang ikut berpengaruh terhadap Mutu Pendidikan SMK, selain Bantuan Pemerintah.

Rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kajian dari evaluasi dampak Pemberian Bantuan Pemerintah kepada SMK terhadap Peningkatan Mutu SMK antara lain: (1) Mendorong pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, utamanya di daerah Kabupaten dan luar Pulau Jawa yang minim sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK dan (2) Perlu dilakukan kajian yang lebih luas mengenai jenis Bantuan Pemerintah yang lain untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pelaksanaan kebijakan/program Bantuan Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allais, S.M. (2009). *Quality Assurance in Education*. Johannesburg: Centre for Education Policy Development.
- Athey, S. dan Imbens, G.W. (2006). Identification and Inference in Nonlinear Difference-in-Difference Model. *Econometrica*, 74(2), 431 – 497.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>
- Billet, S. (2011). *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects*. Germany: Springer Science+Business Media.
- BPMPK, Kemendikbud. (2016). *Bentuk-bentuk Ketimpangan Sosial dalam Masyarakat*. Retrieved from <https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201628/materi1.html>
- Buckley, J. dan Shang, Y. (2002). Estimating Policy and Program Effects with Observational Data: The “Differences-in-Differences” Estimator. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 8, Article 24.
- Clark, L. dan Winch, C. (2007). *Vocational Education: International approaches, developments and systems*. New York: Routledge.
- Conley, T.G. dan Taber, C.R. (2011). Inference with “Difference In Differences” with A Small Number Of Policy Changes. *The Review of Economics and Statistics*, 93(1), 113–125.
- Cuttance, P. (1994). Quality Assurance in Education Systems. *Studies in Educational Evaluation*, 20, 99 – 112.
- Darmastuti, H. dan Karwanto. (2014). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Jurusan Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 2 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3), 9 – 20.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015 – 2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Dimick, J.B. dan Ryan, A.M. (2014). Methods for Evaluating Changes in Health Care Policy The Difference-in-Differences Approach. *Clinical Review & Education*, 312, 2401 – 2402.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215 – 240.
- Fisher, R.C. dan Papke, L.E. (2000). Local Government Responses to Education Grants. *National Tax Journal*, 53(1), 153 – 168.
- Gertler, P.J. et al. (2016). *Impact Evaluation in Practice (second edition)*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Hansen, B., Sabia, J.J., dan Rees, D.I. (2015). Cigarette Taxes and Youth Smoking: Update Estimates Using YRBS Data. *Working Paper in National Bureau of Economic Research No. 21311*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

- Hidayat, E. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Sekolah (Pengaruh dari Faktor Kinerja Mengajar Guru dan Pemanfaatan Sumber Belajar. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 21(1), 81 – 88.
- Khandker, S.R., Koolwal, G.B., dan Samad, H.A. (2010). *Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Li, H., Graham, D.J., dan Majumdar, H. (2012). The Effects of Congestion Charging on Road Traffic Casualties: A Causal Analysis using Difference-in Difference Estimation. *Accident Analysis and Prevention*, 49, 366 – 377.
- Megasari, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP*, 2(1), 636 – 831.
- Pelinescu, E. (2014). *The impact of human capital on economic growth*. Paper dipresentasikan pada 2nd International Conference 'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ESPERA 2014, 13-14 November 2014, Bucharest, Romania.
- PH, Slamet. (2011). Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2.
- Pischke, JS. (2005). *Empirical Methods in Applied Economics: Lecture Notes*. London: London School of Economics and Political Science.
- Puhani, P.A. (2011). The treatment effect, the cross difference, and the interaction term in nonlinear "difference-in-difference" models. *Economics Letters*, 115, 85 – 87.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015.
- Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia*. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Ryan, A.M., Burgess, J.F., dan Dimick, J.B. (2015). Why We Should Not Be Indifferent to Specification Choices for Difference-in-Differences. *Health Services Research*, 1 – 25.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. (2013). *Business Research Methods*. Sixth Edition. Wiley.
- Stuart, E.A. et al. (2014). Using propensity scores in difference-in-difference models to estimate the effects of a policy change. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 14, 166 – 182.
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal MEDTEK*, 3(2).
- Tony, K. (2019). Strategies to Improve Education Quality Through Facilities and Infrastructures Management in Singkawang Vocational School. *Journal of Education, Teaching, and Learning*, 4(2), 296 – 299.
- Tukan, D.D. dan Parida, L. (2016). Persepsi dan Konsepsi Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa*, 2(2).
- Tjalla, A. (2010). *Potret Mutu Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Hasil-Hasil Studi Internasional*. Paper dipresentasikan pada *Temu Ilmiah Nasional Guru II: Membangun Profesionalitas Insan Pendidikan Yang Berkarakter dan Berbasis Budaya*, 24–25 November 2010, Tangerang Selatan.
- UNESCO. (2013). *Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice*. Germany: UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training.
- Usher, A. (2006). *Grants for Students: What They Do, Why They Work*. Toronto, ON: Educational Policy Institute

- Wilson, R.A. dan Briscoe, G. (2004). *The impact of human capital on economic growth: a review*. Thessaloniki: Cedefop.
- Wing, C., Simon, K., dan Bello-Gomez, R.A. (2018). Designing Difference in Difference Studies: Best Practices for Public Health Policy Research. *Annual Review of Public Health, 39*, 453 – 469.
- World Economic Forum. (2016). *World Economic Forum Annual Meeting 2016: Mastering The Fourth Industrial Revolution*. Switzerland: World Economic Forum.
- Yolanda, F.Y. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sijunjung (Tesis)*. Padang: Universitas Andalas.
- Yudi, A.A. (2012). Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau dari Segi Sarana dan Prasarana (Sarana dan Prasarana PPLP). *Jurnal Cerdas Sifa, (1)*.